KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ancaman banjir besar, legislator serukan penanganan terpadu
Tanggal : Rabu, 21 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Ancaman Banjir Besar

Legislator Serukan Penanganan Terpadu

ANGGOTA Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari mengingatkan banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa merupakan bukti nyata ancaman perubahan iklim. Pemerintah diminta mengintensifkan strategi adaptasi dan mitigasi secara komprehensif agar dampak bencana tidak semakin parah.

"Rangkaian bencana hidrometeorologi ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh," ujar Ratna di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Diketahui, berdasarkan data terbaru, banjir di Jawa Tengah (Jateng) telah merendam ribuan rumah dan berdampak pada sedikitnya 137.601 jiwa. Selain permukiman, banjir juga menggenangi lahan pertanian, merusak tanggul dan memutus akses infrastruktur vital yang mengancam ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

Ratna menekankan, penanganan banjir tidak boleh lagi dilakukan secara parsial. Perlu ada penanganan dampak cuaca ekstrem ini dari hulu ke hilir. Di antaranya mempercepat pembangunan dan perawatan bendungan, tanggul, serta normalisasi sungai.

Pemerintah harus memperkuat program penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan perlindungan kawasan resapan air. "Kami mendorong penguatan sistem drainase perkotaan dan teknologi peringatan dini berbasis risiko bencana," kata politikus PKB ini.

Selain itu, Ratna menuntut Pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku perusakan lingkungan dan pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara tidak terkendali. Karena penegakan hukum yang konsisten adalah kunci utama keberhasilan mitigasi.


FOTO: WEB PKB

Ratna Juwita Sari

Dia juga mengingatkan jangan sampai kepentingan dan keuntungan pihak tertentu malah mengorbankan keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memimpin dengan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan demi tanggung jawab kepada generasi mendatang.

Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik menambahkan, rangkaian kejadian banjir besar di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, sebagai alarm menurunnya daya dukung lingkungan. Hal ini diakibatkan karena rusaknya kawasan resapan dan melemahnya tata kelola DAS.

"Degradasi DAS seperti hilangnya vegetasi penyangga, meningkatnya limpasan permukaan dan pendangkalan sungai memperbesar risiko banjir," ujar Jamaludin dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).

Dia mencontohkan, banjir yang terjadi di Kabupaten Jepara, menunjukkan pola klasik kerentanan hidrologi. Artinya kapasitas aliran sungai tertekan, bantaran rentan, dan ruang air menyempit. "Dalam perspektif lingkungan, banjir adalah gejala dari sistem yang tidak sehat," imbuhnya

Bila DAS rusak, sungai dangkal, dan ruang air menyempit, hujan dengan intensitas tinggi akan berubah menjadi bencana. "Ini persoalan struktural, bukan insiden musiman," ucap politikus Golkar menekankan.

Untuk itu, dia meminta agar persoalan banjir di Jepara harus dilihat dalam konteks aktivitas yang mempercepat kerusakan lingkungan. Seperti adanya pertambangan ilegal yang memperparah erosi dan meningkatnya beban sedimen ke sungai.

"Jadi seluruh pertambangan ilegal termasuk Galian C harus menjadi target utama penertiban untuk mengendalikan banjir," tegas dia.

Selain itu, ia menyoroti maraknya praktik Galian C di wilayah Pati, Jepara, Kudus, dan Demak. Praktik ilegal tersebut berkontribusi mempercepat kerusakan hidrologi. Seperti melalui pembukaan lahan tanpa kendali, yang mengakibatkan peningkatan erosi, sedimentasi sungai, dan melemahnya stabilitas bantaran.

Pertambangan ilegal tidak boleh ditoleransi. Aktivitas tanpa izin harus ditertibkan dan ditindak tegas. Termasuk penghentian operasi di lapangan dan penegakan sanksi yang memberi efek jera. "Ini menyangkut keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan," tandasnya.

Untuk itu, ia mendorong operasi penertiban terpadu lintas instansi, pemetaan titik rawan berbasis data, dan pemulihan lahan dan bantaran yang telah rusak. Caranya melalui normalisasi titik kritis sungai, perbaikan drainase permukiman. "Yang penting penegakan tata ruang agar daya dukung lingkungan kembali meningkat," pungkasnya. ■ TIF